

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Naufal Rizqullah

NPP. 31.0689

Asdaf Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email : naufalrizqullah59178@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Eko Subowo, M.BA

ABSTRACT

Problem/Background (Gap): *The focus of this study is on the issue of regional asset disposal (BMD) in Balangan Regency, which faces a shortage of human resources with standardized competencies in BMD management and inventory. This deficiency results in substantial losses of assets before their disposal, thereby causing financial detriment to the government of Balangan Regency. Consequently, there is a pressing need to enhance the effectiveness of BMD disposal in Balangan Regency, located in South Kalimantan Province. Objective: This research aims to identify the challenges and opportunities for improving the effectiveness of BMD disposal in Balangan Regency. Methodology: Qualitative research employing a descriptive method and an inductive approach was utilized. Data were gathered through interviews, observations, and documentation, involving 11 informants. Results/Findings: The study findings indicate that the effectiveness of BMD disposal by the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Balangan Regency is assessed across five dimensions: Productivity, Quality, Efficiency, Flexibility, and Satisfaction. Conclusion: The study concludes that the current effectiveness of BMD disposal by BPKAD in Balangan Regency has not been fully optimized. The study recommends that BPKAD in Balangan Regency should take steps to improve the effectiveness of regional asset disposal.*

Keywords: *BMD, Management, Effectiveness, BPKAD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Balangan yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar dalam pengelolaan BMD dan Inventarisasi yang kurang sehingga banyak aset yang hilang sebelum bisa dihapuskan dan merugikan pemerintah Kabupaten Balangan sehingga perlu peningkatan efektivitas penghapusan BMD di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti tantangan serta peluang untuk peningkatan efektivitas penghapusan BMD di Kabupaten Balangan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan Teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 11 informan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tingkat efektivitas penghapusan BMD yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Balangan dengan 5 dimensi yaitu Produktivitas, Mutu/Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan. **Kesimpulan:** Efektivitas yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Balangan belum dilaksanakan dengan optimal. Penulis menyarankan kepada BPKAD Kabupaten Balangan untuk meningkatkan efektivitas penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. **Kata Kunci:** BMD, Pengelolaan, Efektivitas, BPKAD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. BMD mencakup semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun peralatan lainnya. Efektivitas penghapusan BMD menjadi fokus utama dalam upaya menjaga efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset pemerintah. Penghapusan aset yang tidak lagi produktif atau tidak dapat digunakan sangat penting untuk menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa aset pemerintah selalu berada dalam kondisi optimal untuk menunjang pelayanan publik.

Kabupaten Balangan dalam pengelolaan BMD juga menjadi tantangan tersendiri. Kabupaten Balangan, sebagai daerah yang relatif muda, harus menghadapi berbagai hambatan dalam memastikan bahwa penghapusan BMD dilakukan secara efektif. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Balangan, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini, telah berupaya mengoptimalkan proses pengelolaan dan penghapusan aset. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan penghapusan BMD di daerah ini.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar. Pengelolaan dan penghapusan aset memerlukan tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. Kurangnya tenaga ahli ini menyebabkan proses penghapusan aset tidak dapat dilakukan dengan optimal. Para pengelola aset sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan prosedur yang benar, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD. Kurangnya pengawasan juga terhadap barang milik daerah merupakan tantangan signifikan. Pengawasan yang lemah dalam pelaksanaannya mengakibatkan aset-aset yang seharusnya dihapuskan atau dipindahtangankan tidak terdeteksi dengan baik pada pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan aset-aset tersebut tetap tercatat dalam inventaris meskipun sudah tidak lagi berfungsi atau bermanfaat. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset yang ada tercatat dengan akurat dan dihapuskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kendala lainnya adalah kurangnya pengamanan inventarisasi barang milik daerah. Inventarisasi yang tidak memadai menyebabkan data aset tidak akurat dan sulit untuk dipantau. Ketidakakuratan data ini mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola aset yang perlu dihapuskan. Proses inventarisasi yang baik memerlukan sistem yang terintegrasi dan up-to-date, serta tenaga kerja yang mampu mengelola data dengan baik.

Kabupaten Balangan, yang diresmikan pada tanggal 8 April 2003, masih tergolong sebagai kabupaten muda dengan usia 20 tahun, menjadikannya kabupaten paling muda di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai tahapan pengelolaan aset atau barang milik daerah di Kabupaten Balangan, terutama pada proses penghapusan. Analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan pengelolaan aset serta membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan penghapusan aset. Hal ini menjadi penting mengingat jumlah aset Balangan seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Kabupaten Balangan Tahun 2019

Daftar Nilai Aset Tetap dan Aset lainnya 2019		
Aset Tetap		
No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	489.395.642.968

2	Peralatan Dan Mesin	334.211.933.955
3	Gedung Dan Bangunan	828.499.688.464
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	1.665.463.196.942
5	Aset Tetap Lainnya	7.815.510.170
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	54.128.015.238
7	Akumulasi Penyusutan	(1.426.601.174.219)
8	Jumlah Aset Tetap	1.952.912.813.518
Aset Lainnya		
9	Tagihan Piutang penjualan anggaran	-
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	19.150.000
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendehara	10.748.500
12	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
13	Aset Tidak Berwujud	1.585.408.050
14	Akumulasi Amortisasi	(907.689.290)
15	Aset Non Lancar Lainnya	-
16	Aset Lain-lain	68.082.276.393
17	Akumulasi Aset Lain-lain	(45.119.629.771)
18	Jumlah Aset Lainnya	23.670.263.882

Sumber: sipandabmd.balangkab.go.id

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Balangan memiliki fokus yang komprehensif pada penghapusan barang yang rusak berat dan pengendalian aset. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai dengan sensus Barang Milik Daerah (BMD) sebagai dasar untuk penetapan jumlah barang yang harus dihapuskan. Dalam konteks ini, penelitian di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa pencapaian target penghapusan 800 item barang milik daerah dilakukan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis, meskipun terdapat kendala dalam pencatatan inventaris yang tidak lengkap dan pengendalian yang belum sepenuhnya efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, khususnya dalam upaya optimalisasi APBD Kabupaten Bengkulu Utara melalui pengoptimalan aset daerahnya. Rizky Adi Pratama (2022) menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya pemborosan APBD adalah banyak aset yang tidak dimanfaatkan dan menumpuk di Gudang atau aset Bangunan yang terbengkalai sehingga harus di dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli daerah atau dihapuskan saja untuk mengurangi beban pemeliharannya (Rizkt Adipratama, 2022). Penelitian Ricky Prayoga, dkk menemukan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan penghapusan barang milik daerah oleh BPKAD Provinsi Riau dengan melalui pemindahtanganan atau penjualan aset yang tidak optimal lagi namun pada Tingkat Kabupaten masih belum terlaksana seperti yang BPKAD Provinsi Riau Arahkan. (Ricky Prayoga, dkk,

2020). Penelitian Aulia Rahman, dkk menemukan dan berfokus kepada Penilaian aset harus dengan teliti dihitung yakni biaya perolehan dan penyusutannya (Aulia Rahman, dkk, 2019). Penelitian Kinan Bestari, dkk menemukan bahwa masih terdapat belum sepenuhnya sesuai mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan di Sumatera utara dengan peraturan menteri Keuangan mengenai aset negara (Kinan Bestari, dkk, 2022). Penelitian Mislinawati, dkk menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan dan penghapusan barang daerah merupakan langkah terakhir dalam upaya pengendalian barang daerah. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng karena jika ada barang yang berada di bawah pengelolaan dan pengendalian suatu lembaga pemerintah yang tidak memperhatikan masalah penghapusan, maka kemungkinan akan timbul kondisi di mana barang yang masuk tidak dapat berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan pemerintah, tetapi justru membebani biaya pemeliharaan, bahkan rentan terhadap pencurian (Mislinawati, dkk, 2023). Penelitian Anugraini, dkk menemukan menganalisis proses penghapusan barang milik daerah dan kesesuaian proses eliminasi dengan regulasi yang mengatur manajemen barang milik daerah di BPPKAD Kabupaten Blora. Empat indikator mengatur proses penghapusan, yaitu sistem kontrol internal, regulasi, standar operasional dan prosedur, serta sumber daya manusia (Puryandani, 2019). Penelitian Juniar Rahmah menemukan bahwa koordinasi antara kedua instansi telah dilakukan, namun masih terdapat hal-hal yang belum berjalan maksimal diantaranya adalah koordinasi mempersiapkan surat-surat kendaraan baik sebelum dihapus maupun telah dihapus, komunikasi yang lebih intensif, kemampuan pegawai, partisipasi secara maksimal. Kedua instansi harus berperan lebih maksimal dengan cara meningkatkan kinerjanya dalam rangka melakukan koordinasi agar apa yang telah ditentukan akan tercapai secara maksimal (Juniar Rahmah, 2023). Perwito, dkk menemukan bahwa Masalahnya adalah pencatatan aset yang akan dihapus tanpa kondisi fisik yang jelas dan banyaknya aset yang tidak tercatat, membuat pencarian data tidak efisien. Solusinya adalah merancang sistem informasi penghapusan aset tetap berbasis web dengan menggunakan model waterfall, PHP, dan MySQL. Metode permodelan sistemnya menggunakan UML, seperti Activity Diagram dan Use Case Diagram, untuk membantu pegawai BPKAD dalam proses penghapusan aset dan penyusunan laporan. (Perwito, dkk, 2021). Penelitian Ati Zaidah, dkk menemukan bahwa Perusahaan mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset, termasuk dalam pengajuan pembelian, perhitungan nilai dan umur ekonomis, serta penghapusan aset. Masalahnya disebabkan kurangnya manajemen pengelolaan aset yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode straight line untuk penyusutan dan Simple Additive Weighting untuk penghapusan, membantu PT. Andaru Arti Agung memiliki data aset yang valid dan menghitung modal perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki. (Ati Zaidah, dkk, 2021). Penelitian Khalid Fauzi, dkk menemukan bahwa dikatakan bahwa pemerintah daerah Gunungkidul sudah melakukan implementasi penghapusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007. Implementasi yang dilakukan pemerintah daerah mulai dari pengusulan sampai terbitnya SK Bupati tentang penghapusan aset tetap sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pemerintah daerah tidak didukung dengan adanya SOP yang dikarenakan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, ada kendala dalam sumber daya manusia yaitu kurangnya pegawai yang mengakibatkan proses penghapusan aset tetap terganggu (Khalid Fauzi, dkk, 2015). Penelitian Pertiwi menunjukkan bahwa prosedur penghapusan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan telah sesuai dengan teori dan aturan yang berlaku dan di gunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku (Pertiwi Punky 2017). Penelitian Manalu menemukan bahwa Aset/ barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan

surat-surat berharga lainnya (Rivaldo Kristian, 2021). Penelitian ini menggunakan flowchart, dokumentasi foto, dan perhitungan penilaian aset menggunakan metode Depreciate Replacement Cost (DRC). Penelitian Rita Sri menggunakan objek lima kendaraan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima kendaraan tersebut, tiga sepeda motor dan dua mobil mengalami kerusakan berbagai tingkat, di mana tiga sepeda motor dapat dibuang dan dua mobil dapat diperbaiki (Rita Sri Jayanti, 2019). Penelitian Nabila Safitri menunjukkan menunjukkan bahwa PT. BPR Suryajaya Kubutambahan menilai kualitas aset penghasilan seperti pinjaman dan penempatan pada bank lain, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 33 tahun 2018. Dalam pembentukan PPAP, PT. BPR Suryajaya Kubutambahan mengikuti persentase yang diatur dalam regulasi dan juga mempertimbangkan nilai jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank (Safitri, dkk 2018). Penelitian oleh Ishak Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset / Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengalami kelebihan kapasitas di gudang penyimpanan. Terdapat 2120 aset / barang yang sangat rusak dan belum dihapus dari Daftar Inventaris Barang milik Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sehingga tidak dapat dihancurkan (Ishak, Wulandari, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas BPKAD dalam penghapusan BMD, dengan menggunakan teori Gibon yang mencakup 5 dimensi yakni dimensi Produktivitas, Mutu/Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan. Efektivitas penghapusan BMD oleh BPKAD dengan turunan pengelolaan BMD oleh Peraturan Bupati, visi, dan misi daerah yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain.

1.5 Tujuan

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas proses penghapusan BMD sebagai tanggapan terhadap permasalahan peningkatan nilai aset tetap dan meningkatnya jumlah pemindahtanganan BMD.

II. METODE

Penulis menggunakan Teori James L. Gibson dalam Kurniawan (2005:107) yang berisikan 5 dimensi, yaitu :

- (1) Produktivitas adalah cermin dimana organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang dibutuhkan lingkungan.
- (2) Mutu/Kualitas adalah semua proses pelaksanaan harus sesuai dengan harapan/hasil yang sesuai bagi pihak yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan penghapusan itu sendiri.
- (3) Efisiensi merupakan ukuran penggunaan sumber daya dalam organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pengukuran biaya dan waktu pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Fleksibilitas merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan.
- (5) Kepuasan, Pengukuran tingkat kepuasan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan mengevaluasi tersedianya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan Teknik analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11

orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPKAD Kabupaten Balangan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPKAD Kabupaten Balangan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Balangan, Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Balangan, Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Balangan, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Balangan, dan Staf Pengurus Barang Milik Daerah Kabupaten Balangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Balangan menggunakan Teori Efektivitas dari Gibson yang menyatakan bahwa terdapat lima dimensi yaitu Produktivitas, Mutu/Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Produktivitas

Produktivitas adalah cermin dimana organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang dibutuhkan lingkungan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bagaimana produktivitas adalah bagaimana pencapaian/hasil pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang rusak berat. Produktivitas diperoleh dari pencapaian tersebut dapat berupa tujuan/sasaran, program, dan strategi/kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. Indikator yang digunakan penulis dalam mengukur pencapaian produktivitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan hal yang pasti dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga untuk dicapai. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan serangkaian proses ataupun tahap-tahap yang harus dilalui, sehingga membutuhkan identifikasi isu masalah dengan memperhatikan waktu pelaksanaannya. Proses pemusnahan barang milik daerah (BMD) di Kabupaten Balangan sering menghadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keberhasilannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami dengan baik prosedur pemusnahan sesuai regulasi yang berlaku. Beberapa dinas terkait mungkin tidak memiliki personel yang terlatih atau berpengalaman dalam mengelola barang daerah terkhusus pada proses pemusnahan aset secara efektif. Selain itu, catatan inventaris yang tidak lengkap atau tidak akurat juga menjadi masalah karena dapat menyebabkan kesulitan dalam mengejar target penghapusan sesuai waktu yang telah ditentukan.

2. Strategi

Dalam pencapaian tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi atau lembaga tentunya membutuhkan strategi pencapaian dari sasaran tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut juga dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Balangan dalam penghapusan barang milik daerah secara administrasi. BPKAD tentunya telah membuat beberapa inovasi dalam terselenggaranya penghapusan yang efektif. Pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang dimiliki BPKAD merupakan langkah strategis dalam pencapaian penghapusan secara administrasi dengan efektif. oleh BPKAD Kabupaten Balangan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui SIPANDA, BPKAD dapat meminimalisir ketidaktertiban administrasi dan kesalahan manusia dalam pengelolaan aset daerah, serta memudahkan pembagian aset berdasarkan kondisi dan statusnya. Dengan pencatatan dan pemantauan aset secara terintegrasi dan real-time, SIPANDA juga memfasilitasi identifikasi aset yang perlu dihapuskan atau dipindahtangankan dengan informasi yang akurat dan mudah

diakses. Hal ini sesuai dengan tujuan Renstra BPKAD untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan BMD. Dengan demikian, penerapan SIPANDA diharapkan dapat membawa perbaikan signifikan dalam manajemen aset daerah, meningkatkan transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset di Kabupaten Balangan.

3. Program

Program yang harus tersusun tentunya harus disesuaikan dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga mendapatkan program yang menjadi prioritas. Dalam pelaksanaan Penghapusan aset daerah oleh BPKAD Kabupaten Balangan, program yang diprioritaskan adalah pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang rusak berat. Berdasarkan hasil penelitian, yang dimaksud dengan barang milik daerah kondisi rusak berat oleh BPKAD Kabupaten Balangan adalah barang-barang berupa peralatan dan mesin kantor yang tergolong dalam KIB B yang masa penggunaannya tidak efisien lagi dan menambah beban pemeliharaan bagi SKPD. Oleh sebab itu, program yang paling tetap dalam pelaksanaan penghapusan yang sudah disusun oleh BPKAD adalah program penghapusan secara besar-besaran untuk peralatan dan mesin yang rusak berat yang dikelola oleh seluruh SKPD di Kabupaten Balangan.

3.2 Mutu/Kualitas

Dalam mengukur mutu/kualitas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh BPKAD Kabupaten Balangan, maka indikator yang sesuai adalah "Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik". Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gibson tentang mutu/kualitas yaitu semua proses pelaksanaan harus sesuai dengan harapan/hasil yang sesuai bagi pihak yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan penghapusan itu sendiri yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Mutu/kualitas bisa tercapai secara maksimal apabila dalam pengawasan dan pengendaliannya dilakukan secara teliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak yang melaksanakan pengawasan dituntut harus menguasai prosedur yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan pengawasan apabila terjadi kesalahan oleh tim penghapusan maka dapat di beritahukan kebenarannya sesuai dengan aturan. kegiatan penghapusan masih belum efektif karena berdasarkan Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Balangan 2021-2026 bahwa masih banyak peralatan dan mesin yang sudah dilelang namun barang masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang karena Surat Keputusan pelelangan tidak ditemukan karena adanya kelalaian. Selanjutnya, masih banyak peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, hilang karena kelalaian namun masih belum ada tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan BPKAD ke SKPD yang bertanggung jawab atas peralatan dan mesin tersebut.

3.3 Efisiensi

Efisiensi merupakan ukuran penggunaan sumber daya dalam organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pengukuran biaya dan waktu pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang sesuai dalam hal mengukur efisiensi penghapusan barang milik daerah adalah indikator Perencanaan yang matang. Mengukur waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh organisasi tentunya harus dilakukan penyusunan perencanaan secara matang dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilakukan oleh BPKAD terkait penghapusan barang yang rusak berat sudah dilaksanakan semenjak tahun 2021, rencana tersebut sejalan lurus dengan pelaksanaan sensus BMD sebagai titik awal dalam penetapan jumlah barang yang kondisi rusak berat. Berdasarkan hasil sensus BMD bahwa jumlah BMD yang harus dihapuskan sebanyak 800 item. BPKAD Kabupaten Balangan sudah melaksanakan perencanaan dengan baik terhadap pengelolaan barang milik daerah khususnya

penghapusan barang yang rusak berat pada indikator perencanaan yang matang, sehingga dimensi efisiensi bisa terpenuhi dengan baik.

3.4 Fleksibilitas

Berdasarkan pendapat Gibson bahwa, fleksibilitas merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Hal tersebut sesuai dengan indikator “proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap” karena dalam mengelola sumber daya yang ada tentunya harus memahami peraturan dan menetapkan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kabupaten Balangan dalam hal fleksibilitas ini mengacu pada kesesuaian dengan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan barang milik daerah untuk dirumuskan analisisnya. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Balangan untuk bagaimana menentukan kebijakan terkait pelaksanaan penghapusan barang milik daerah belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut sesuai dengan laporan pemeriksaan BPK Tahun 2022 yaitu Aset tetap, peralatan dan mesin yang hilang senilai Rp153.807.498,80 masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Masalah tersebut terjadi karena masih belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait penghapusan BMD secara lebih jelas dan terperinci. Oleh sebab itu, Dimensi Fleksibilitas masih belum terpenuhi karena masih belum ada kebijakan dan peraturan khusus yang disusun terkait penghapusan BMD. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah (BMD) di Kabupaten Balangan sering kali menghadapi sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi efisiensi dan keberhasilannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Balangan. Faktor-faktor ini meliputi aspek sumber daya manusia, pengelolaan barang rusak, serta kompleksitas proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

3.5 Kepuasan

Pengukuran tingkat kepuasan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan mengevaluasi tersedianya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Balangan. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh BPKAD meliputi berbagai bentuk pelayanan, termasuk fasilitas kemudahan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penghapusan barang. pengukuran tingkat kepuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPKAD, seperti kemudahan pengurusan dokumen penghapusan dan Surat Keputusan (SK) pelepasan. Respons positif dari SKPD menunjukkan bahwa peningkatan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan dokumen sangat dihargai, meskipun ada tantangan dalam memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap peraturan. BPKAD terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem, termasuk peningkatan teknologi informasi dan pelatihan bagi SKPD, serta membuka saluran komunikasi yang lebih luas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepuasan SKPD dan memastikan efisiensi serta efektivitas penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Balangan. Fasilitas utama adalah kemudahan dalam pengurusan dokumen penghapusan barang dan Surat Keputusan (SK) pelepasan. BPKAD berperan aktif dalam mengelola dan mengurus proses administrasi tersebut, sehingga SKPD dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan penghapusan barang milik daerah. Evaluasi terhadap pelayanan ini mencakup penilaian terhadap kecepatan, kejelasan prosedur, dan kepuasan pengguna layanan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Efektivitas penghapusan barang milik daerah yang rusak berat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Balangan adalah bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan penghapusan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tolak ukur dalam membandingkan rencana kerja dan proses dengan hasil yang telah dicapai merupakan cara terbaik yang digunakan suatu organisasi dalam menilai tingkat efektivitas suatu program dan kegiatan. Teori yang disebutkan oleh James L. Gibson bahwa efektivitas merupakan produktivitas, mutu/kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan. Lima teori tersebut merupakan bentuk dari pencapaian efektivitas itu sendiri. Pencapaian efektivitas tersebut didukung dengan adanya tujuh indikator pengukuran tingkat efektivitas. Tujuh indikator tersebut mempermudah penulis dalam menentukan apakah lima teori yang disebutkan Gibson sudah tercapai atau belum. Teori efektivitas Gibson berperan penting dalam mengukur keberhasilan BPKAD dalam pelaksana penghapusan barang milik daerah yang rusak berat karena mempermudah penarikan kesimpulan bagi penulis..

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian, analisis data, dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah oleh BPKAD Kabupaten Balangan dapat dilihat dari pencapaian target penghapusan 800 objek barang, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, perencanaan matang, kebijakan yang fleksibel, serta kepuasan tinggi dari SKPD terkait kemudahan proses dokumen dan pelelangan. Namun, terdapat kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pengawasan, dan pengamanan inventarisasi yang menyebabkan data aset tidak akurat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengadakan pelatihan, membentuk tim sensus inventarisasi dengan teknologi pendukung, serta mengembangkan sistem aplikasi SIPANDA untuk pencatatan dan pemantauan aset secara real-time, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu tempat saja sebagai lokasi pengambilan data.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penghapusan barang milik daerah di Kabupaten Balangan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan, terkhususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan, Kepala Pelaksana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, Dosen pembimbing dan penguji serta pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik: vol. Viii (ramelan, ed.)*. Ppm. <https://books.google.co.id/books?id=6ZU8NQAACAAJ>
- Rahman, M. A. (2016). *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://repository.uin-suka.ac.id/id/eprint/12340057>
- Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 49-62. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1211>
- Mislinawati, & Mohd. Saadi Nurdin. (2023). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Dan Sistem Informasi Akuntansi Penghapusan Barang Milik Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 49 -62. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7791>
- Pratama, A., & Rizky. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Diploma thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16198>
- Prayoga, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Retrieved from repository.uin-suska.ac.id
- Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2019). Implementasi Penghapusan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud: Studi Kasus pada BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2019. *Magisma*, 9(1). Retrieved from <https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.147>
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (Year not specified). Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance). DOI: <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2570>
- Nissa, K. N., Perwito, & Kusumadiarti, R. S. (2021). Perancangan Penghapusan Aset Tetap Pada BPKAD Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.487>
- Zaidiah, A., Isnainiyah, I. N., & Siahaan, T. L. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Penghapusan Aset Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Web Pada PT. Andaru Arti Agung. *Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi*, 2(2), Article 487. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.487>
- Aziz, K. F., Suprihanto, J., & M.I.M. (2015). Evaluasi Implementasi Penghapusan Aset Tetap (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). Tesis, S2 Akuntansi. etd.repository.ugm.ac.id
- Pertiwi, Punky. (2017). *Prosedur Penghapusan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Mahasiswa thesis, Politeknik Negeri Manado. <http://repository.polimdo.ac.id/id/eprint/1269>
- Manalu, Rivaldo Kristian. (2021). Analisis Sistem Pencatatan dan Penghapusan Aset yang tidak Produktif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Bpkad) Provsu. Tesis, Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34561>
- Jayanti, R. S., Aryani, R. A., & Suprayitno, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). *Jurnal Aplikasi Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12714>

- Safitri, N., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) berdasarkan POJK 33 Tahun 2018 pada PT BPR Suryajaya Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 630-638. DOI: <https://doi.org/10.23887/ijah.v12i3.50054>
- Wulandari, D. (2020). Pelaksanaan penghapusan aset/barang milik daerah di sekretariat daerah Provinsi Riau tahun 2017. *JOM FISIP*, 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1461513>

